

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan unsur penting dalam melaksanakan roda pemerintahan. ASN juga dijuluki sebagai “mesin” birokrasi yang menggerakkan sumber daya-sumber daya yang tersedia untuk mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi pemerintah. Menyadari pentingnya peran aparatur sipil negara, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang merupakan upaya dalam melakukan reformasi birokrasi bidang sumber daya manusia aparatur. Namun dalam Undang-Undang baru ini menekankan perubahan yang fundamental dibandingkan dengan peraturan kepegawaian sebelumnya. Perubahan-perubahan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 pada pokoknya ditujukan untuk membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.¹

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN pada Pasal 68 yang menyatakan bahwa:

¹ Taufik, “Lelang Jabatan Sebagai Inovasi Dalam Penempatan Aparatur Sipil Negara di Indonesia”. *Jurnal Desentralisasi Dan Kebijakan Publik* (2020) h. 1

1. PNS diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu pada instansi pemerintahan. Ayat (1)
2. Pengangkatan PNS pada jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan perbandingan objektif dan kompetensi, kualifikasi dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dimiliki oleh pegawai.
3. Setiap jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan dalam klasifikasi jabatan PNS yang menunjukkan kesamaan karakteristik, mekanisme dan pola kerja.
4. PNS dapat berpindah antar dan antara Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional, di Instansi Pusat dan Instansi Daerah berdasarkan Kualifikasi, Kompetensi dan Penilaian Kerja.²

Seleksi terbuka dalam Undang Undang Aparatur Sipil Negara diatur dalam Pasal 72 bahwa “setiap PNS yang memenuhi syarat mempunyai hak yang sama untuk dipromosikan ke jenjang jabatan yang lebih tinggi”. Hal ini berarti sistem karier dan promosi Pegawai Negeri Sipil harus terbuka dan kompetitif. Untuk menindaklanjuti Undang Undang ASN tersebut, diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 11

² Pasal 68 Ayat (1-4), Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) sebagaimana diatur dalam UU ASN adalah pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT). Persyaratan PNS untuk dapat diangkat agar dapat menduduki suatu jabatan struktural (Administrator hingga JPT) salah satunya harus memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang telah ditentukan. Pada hakikatnya kualifikasi dan tingkat pendidikan akan mendukung pelaksanaan tugas dalam jabatannya secara profesional, khususnya penerapan kerangka teori, analisis metodologi pelaksanaan tugas dalam jabatannya.³

Pemerintah Kabupaten Seluma mengadakan lelang jabatan struktural terhadap beberapa kepala Organisasi Perangkat Daerah yang lowong jabatan. Dalam rangka pengisian jabatan struktural berdasarkan Surat pengumuman tentang Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma, maka Panitia Seleksi mengundang dan memberi kesempatan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kabupaten Seluma yang berminat dan memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri mengikuti seleksi terbuka.⁴ Namun, dari serangkaian mekanisme lelang jabatan yang diselenggarakan oleh

³ A. Mius "Implementasi Kebijakan Terbuka Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Kota Pekanbaru Provinsi Riau". *Jurnal Kebijakan Pemerintahan-FPP IPDN* (2019) h. 2

⁴ Dikutip dari <https://rbtv.disway.id/read/4462/hari-terakhir-pendaftaran-lelang-jabatan-di-pemkab-seluma-masih-sepi-peminat-ada-rencana-diperpanjang>, di Akse pada 8 April 2023

Pemerintah Kabupaten Seluma, masih terdapat kelemahan dalam pelaksanaannya dan belum sepenuhnya memenuhi peraturan yang ada sehingga mempengaruhi hasil dari seleksi.

Mengenai keterkaitan mekanisme pengangkatan PNS dalam jabatan struktural melalui lelang jabatan (seleksi terbuka) yang harus diselenggarakan dengan sistem merit sebagai agenda reformasi dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan demokratis. Instansi pemerintah boleh saja menyusun detail tahapan lelang jabatan yang berbeda berdasarkan kewenangan masing-masing namun semuanya tetap adanya keterbukaan proses sesuai dengan yang diharapkan berdasarkan amanat perundang-undangan serta dikaji dari perspektif ketatanegaraan Islam.

Sementara yang terjadi di Kabupaten Seluma, lelang jabatan masih belum dilaksanakan sesuai dengan harapan yang diinginkan. Karena itu, dari penjelasan di atas penulis tertarik untuk meneliti bagaimana proses lelang jabatan struktural di Kabupaten Seluma, lalu bagaimana lelang jabatan dalam pandangan Islam. Berdasarkan pemaparan pada latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul "Seleksi Jabatan Struktural Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Perspektif Siyasa Idariyah".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis jelaskan sebelumnya, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Mekanisme Seleksi Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma?
2. Bagaimana Tinjauan Siyasa Idariyah Terhadap Seleksi Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma?

C. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini agar dapat terjawab dan pembahasan penelitian tidak melebar, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini penulis batasi hanya kepada persoalan mengenai Lelang Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma untuk mengisi kekosongan jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari uraian latar belakang, rumusan masalah dan batasan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut ini:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Mekanisme Seleksi Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma.

2. Untuk Mengetahui Bagaimana Tinjauan Siyasah Idariyah Terhadap Seleksi Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan nilai, daya guna dan manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan Secara Teoritis

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam Pengembangan ilmu pengetahuan, terutama mengenai permasalahan dan status Hukum Islam, boleh atau tidaknya terkait lelang jabatan, bagi masyarakat umum, khususnya bagi pemerintah maupun masyarakat yang ingin mengetahui sistem lelang jabatan tersebut.

2. Kegunaan Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis, masyarakat, dan terutama pelaksan lelang jabatan dan peserta lelang jabatan yang terlibat dalam seleksi terbuka, agar dapat lebih teliti melakukan seleksi terbuka lelang jabatan, sehingga apa yang dihasilkan tidak melanggar dari norma-norma syaria'ah dan penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menemukan beberapa penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam pembahasan penelitian ini. Oleh karena itu, untuk menghindari asumsi plagiasi sekaligus menegaskan titik perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya maka dalam penelitian terdahulu ini di paparkan perkembangan beberapa skripsi dan karya ilmiah terkait dengan penelitian yang akan dilakukan.

1. Wulandari, "Peran Lelang Jabatan Dalam Mewujudkan Birokrat Yang Berkualitas". Penelitian yang dilaksanakan merupakan penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan juridis normatif yang menitikberatkan penggunaan data sekunder didukung oleh data-data kepustakaan sebagai sumber utama, yaitu dengan membaca dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, konvensi-konvensi internasional serta tulisan-tulisan lainnya yang berkaitan dengan lelang jabatan. Di samping itu, penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Dalam penelitian ini, penggunaan konseptual ditujukan untuk mengetahui peran lelang jabatan dalam rangka untuk mewujudkan birokrasi yang baik.⁵ Adapun yang menjadi persamaan di dalam

⁵ Wulandari, "Peran Lelang Jabatan Dalam Mewujudkan Birokrat Yang Berkualitas". *Jurnal Sosiologi Nusantara* (2020) h. 2

penelitian ini terletak pada objek kajian yang dikaji yakni membahas mengenai lelang jabatan. Sedangkan yang menjadi perbedaan dengan penelitian ini terletak pada segi perspektif yang digunakan sebagai pisau pembedah analisis.

2. A. Mius, "Implementasi Kebijakan Seleksi Terbuka Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Kota Pekanbaru Provinsi Riau". Penelitian ini berkaitan dengan pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Kota Pekanbaru. Oleh karena itu, untuk mendapatkan hasil yang komprehensif maka desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain penelitian kualitatif. Creswell (2011:34) mengatakan bahwa "penelitian kualitatif sebagai suatu gambaran yang kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang alami". Sementara jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Jenis penelitian ini digunakan karena sifat dan tujuan penelitian yang ingin diperoleh dan bukan menguji sebuah hipotesis, akan tetapi berusaha untuk mendapatkan sebuah gambaran tentang pelaksanaan Seleksi Terbuka JPT Pratama di Kota Pekanbaru.⁶ Adapun yang menjadi persamaan di dalam penelitian ini terletak pada objek kajian yang dikaji yakni membahas mengenai lelang jabatan. Sedangkan yang

⁶ A. Mius, "Implementasi Kebijakan Seleksi Terbuka Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Kota Pekanbaru Provinsi Riau". *Jurnal Kebijakan Pemerintahan* (2019) h. 5

menjadi perbedaan dengan penelitian ini terletak pada segi perspektif yang digunakan sebagai pisau pembedah analisis.

3. Taufik, "Lelang Jabatan Sebagai Inovasi Dalam Penempatan Aparatur Sipil Negara di Indonesia". Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian pustaka merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, dan mencatat serta mengolah bahan penelitian (Zed, 2004). Desain penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut: pertama, menelusuri, mencatat, dan membaca berbagai temuan terkait pembahasan lelang jabatan atau seleksi terbuka jabatan ASN secara umum pada setiap pembahasan hasil penelitian, artikel, maupun laporan dari lembaga yang relevan dengan kajian yang didapatkan dalam literatur-literatur, dan sumber website lembaga resmi pemerintah, maupun lembaga internasional, serta sumber-sumber lainnya yang relevan dengan studi ini. Kedua, memadukan segala temuan, baik teori, model maupun konsep penempatan pegawai ASN. Ketiga, menganalisis setiap temuan dari berbagai bacaan, baik dari sisi kelebihan, kekurangan, maupun keterkaitan tentang tulisan yang dibahas. Tahapan terakhir adalah memberikan gagasan kritis dengan mengelaborasi pendekatan yang berbeda dari

temuan dalam artikel sebelumnya.⁷ Adapun yang menjadi persamaan di dalam penelitian ini terletak pada objek kajian yang dikaji yakni membahas mengenai lelang jabatan. Sedangkan yang menjadi perbedaan dengan penelitian ini terletak pada segi perspektif yang digunakan sebagai pisau pembedah analisis.

G. Metode Penelitian

Penyusunan skripsi ini diharapkan dapat memberikan hasil yang maksimal, sehingga memerlukan metode dan prosedur kerja yang baik dan benar. Oleh karena itu, berikut dipaparkan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah field research, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk memperoleh data yang diperlukan dan penelitian yang obyeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi pada suatu kelompok masyarakat.⁸

b. Pendekatan Penelitian

Peter Mahmud Marzuki bahwa pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum antara lain adalah

⁷ Taufik, "Lelang Jabatan Sebagai Inovasi Dalam Penempatan Aparatur Sipil Negara di Indonesia". *Jurnal Disentralisasi Dan Kebijakan Publik* (2020) h. 3

⁸ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014) h. 18

pendekatan kasus (case approach), pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan Pendekatan Konsep (conceptual approach).⁹

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dalam arti nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.

Pendekatan perundangan-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis semua ketentuan peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang akan diteliti.

Pendekatan konsep merupakan pendekatan yang dilakukan dengan tetap berpatokan pada konsep-konsep awal sebagai dasar pijakan dalam membahas isu hukum yang diteliti. Pendekatan konsep juga bermakna bahwa peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada dalam mengangkat fenomena yang menjadi bahan penelitian.¹⁰

Adapun alasan peneliti menggunakan pendekatan sebagaimana yang telah peneliti cantumkan di atas. Pertama, peneliti mengkaji mekanisme lelang jabatan di lingkungan

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (rev.ed) (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005) h. 133

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (rev.ed) (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005) h. 135

Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma dalam perspektif siyasah idariyah

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan kurang lebih selama 3 bulan, yakni dari Februari hingga Mei 2024, dalam hal ini peneliti menggambarkan keadaan objek berdasarkan informasi yang didapatkan. Adapun alasan peneliti memilih di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Seluma dikarenakan disana terdapat suatu gejala ataupun fenomena yang sekiranya berkaitan dengan latar belakang pendidikan peneliti yang tengah diselesaikan saat ini. Hal ini diindikasikan dengan adanya permasalahan terkait mekanisme lelang jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma.

3. Informan Penelitian

Maka dalam hal ini peneliti menggunakan teknik purposive Sampling yang dimana dalam pemilihan sample berdasarkan dengan kriteria tertentu sehingga mampu memberikan informasi yang spesifik dan representatif tentunya.¹¹ Purposive Sampling digunakan karena adanya pertimbangan tertentu. sampel yang digunakan atau yang diambil bukan berdasarkan strata, random (acak), atau daerah, akan tetapi didasarkan pada suatu tujuan.¹²

¹¹ Abu Ahmad & Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Angkasa, 2002) h. 50

¹² A. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*", (Jakarta: UI Pres, 2012) Cetakan Ke-3, h. 34

Menurut Sugiyono Purposive Sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Alasan menggunakan teknik Purposive Sampling ini karena sesuai untuk digunakan untuk penelitian kualitatif, atau penelitian-penelitian yang tidak melakukan generalisasi menurut Sugiyono.¹³

Maka teknik pengambilan sampel ini berdasarkan penilaian atau pengamatan seorang peneliti mengenai hal-hal dan ciri-ciri apa saja yang berkaitan dengan penelitiannya untuk dijadikan sampel. Sehingga dari itu, teknik pengambilan sampel ini menggunakan latar belakang pengetahuan dari sampel untuk menghitung berdasarkan populasi yang ada supaya mendapatkan sampel yang sesuai dan akurat untuk memenuhi tujuan dari suatu penelitian. Hal ini didasarkan dari perspektif sugiyono terkait penyeleksian informan peneliti seperti yang telah peneliti jabarkan di atas. Sehingga, Dalam penelitian ini penulis memilih informan di Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Orang yang berkedudukan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Seluma
- b. Orang yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemerintahan Kabupaten Seluma

¹³ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014)
h. 181

- c. Orang yang bertanggung jawab atas proses seleksi jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma.
- d. Orang yang terlibat langsung di dalam proses seleksi jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma.

Berdasarkan kriteria tersebut, maka yang dapat dijadikan sampel ataupun informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Informan Penelitian

No	Jabatan	Jumlah
1.	Kepala Bidang Mutasi dan Promosi ASN BKPSDM Kabupaten Seluma	1 Orang
2.	Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi ASN Kabupaten Seluma	1 Orang
3.	Kepala Inspektorat Kabupaten Seluma	1 Orang
4.	Peserta Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	2 Orang
Total		5 Orang

Berdasarkan tabel di atas, informan dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Bidang Mutasi BKPSDM Kabupaten Seluma, Kepala Inspektorat Kabupaten Seluma dan 2 orang peserta yang mengikuti seleksi jabatan di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Seluma. Jadi, total informan pada penelitian ini adalah 5 orang. Hal ini dikarenakan peneliti berangkat dari pandangan Sugiyono terkait penyeleksian informan penelitian yakni penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.

Adapun alasan peneliti memilih informan di atas dikarenakan mempunyai korelasi dan sudah bisa memberikan informasi terkait permasalahan di dalam penelitian ini. Dan berpatokan dengan teori dari Sugiyono pula, menjadi pendukung peneliti dalam menentukan informan pada penelitian ini.

4. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Data Primer

Data primer ialah data yang langsung diperoleh dari objeknya yang menjadi narasumber langsung. Informan dalam penelitian ini yaitu Kepala Bidang Mutasi BKPSDM Kabupaten Seluma, Kepala Inspektorat Kabupaten Seluma dan Peserta yang mengikuti Seleksi Jabatan di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Seluma.

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, berupa publikasi/laporan, arsip/dokumentasi, dokumen pribadi, serta peraturan dan undang undang.¹⁴

¹⁴ J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003) h. 2

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.¹⁵ Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai fenomena-fenomena yang diteliti.¹⁶ Observasi dapat juga diartikan sebagai kegiatan mengamati secara langsung suatu objek untuk melihat dengan dekat kegiatan yang dilakukan objek tersebut. Metode observasi yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi partisipan yakni metode observasi di mana priset juga berfungsi sebagai partisipan, ikut serta dalam kegiatan yang dilakukan kelompok yang diriset, apakah keberadaannya diketahui atau tidak.

Adapun jenis observasi partisipan yang digunakan disini adalah partisipan sebagai priset yaitu observer

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Hukum: Pendekatan Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012) h. 308

¹⁶ Sutrisno Hadi, *Metode Reseach Jilid 2* (Yogyakarta: Andi Offset, 2004) h. 151

(periset) adalah orang dalam dari kelompok yang diamati yang melakukan pengamatan terhadap kelompok itu.¹⁷ Peneliti melakukan observasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.¹⁸ Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan wawancara tak terstruktur yang merupakan wawancara yang berbeda dengan yang terstruktur. Wawancara semacam ini digunakan untuk menemukan informasi yang bukan baku atau informasi tunggal.¹⁹

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Mutasi dan Promosi ASN BKPSDM Kabupaten Seluma, Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi ASN BKPSDM Kabupaten Seluma, Kepala Inspektorat Kabupaten Seluma dan Peserta yang mengikuti Seleksi

¹⁷ Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktik Riset Komunikasi Pemasaran* (Jakarta: Prana Media, 2014) h. 112-113

¹⁸ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian....*h. 186

¹⁹ Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian....*h. 190

jabatan di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Seluma. Hal ini dimaksudkan untuk menggali informasi mengenai mekanisme lelang jabatan yang ada di Kabupaten Seluma.

c. Dokumentasi

Dokumen ialah setiap bahan tertulis ataupun foto. Dokumen biasanya dibagi atas dokumen pribadi dan dokumen resmi. Dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan.²⁰ Maka dokumen yang digunakan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ini :

- 1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN
- 2) Foto dokumentasi penelitian
- 3) Arsip dan profil Kabupaten Seluma
- 4) Berita dari media online dan cetak

6. Teknik Analisis Data

Pada Penelitian hukum yang akan dilakukan ini bahan hukum dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif. Teknik analisis adalah menjelaskan suatu hal yang bersifat

²⁰ Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian*h. 216

husus kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih Umum.²¹

Menurut Peter Mahmud Marzuki yang mengutip pendapat dari Philipus M. Hadjon memaparkan metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles "Penggunaan metode induktif berpangkal dari pengajuan premis minor (pernyataan yang bersifat khusus). Lalu disajikan premis mayor (bersifat Umum), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau conclusion.

H. Sistematika Penulisan

Dalam rangka supaya pembahasan skripsi ini dapat tersusun secara sistematis sehingga penjabaran yang ada dapat dipahami dengan baik, maka penulis membagi pembahasan menjadi lima bab, dan masing-masing bab terbagi kedalam beberapa sub bab.

BAB I. Pendahuluan bab ini menguraikan penjelasan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Kerangka Teori, Metode Penelitian.

BAB II. Kajian Teori, bab ini merupakan bacaan dan kajian peneliti terhadap teori dari berbagai referensi terkait. Kajian ini disusun dengan menyesuaikan pokok-pokok permasalahan.

²¹ Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian*h. 24

BAB III. Gambaran umum objek penelitian, bab ini menguraikan tentang profil objek penelitian sehingga memberikan informasi yang jelas dan berhubungan dengan penelitian.

BAB IV. ini berisikan data dan fakta dan temuan penelitian, pengolahan data, hasil analisis data penelitian.

BAB V. Penutup, bab ini menjelaskan kesimpulan dari pokok permasalahan dan saran-saran.

